

Perkembangan dan Dampak Program Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Pada Masa Pandemi Covid-19

Elpa Hermawan

Universitas Bina Sarana Informatika

e-mail: elpa.ehn@bsi.ac.id

| Diterima | Direvisi | Disetujui |
|------------|------------|------------|
| 22-11-2021 | 19-01-2022 | 19-01-2022 |

Abstrak - Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan dan dampak dari program bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro (BPUM) di masa pandemi Covid-19. Program ini sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menghadapi dampak dari kondisi pandemi terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Pendekatan penelitian adalah penelitian kualitatif melalui metode evaluasi model CIPP (*context, input, process, product*). Data dikumpulkan melalui observasi dan dokumen kebijakan program BPUM. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada setiap aspek CIPP telah diterapkan sesuai prosedur dan pemerintah juga melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait. Program BPUM telah memiliki dampak yang besar terhadap pertahanan usaha bagi para pelaku usaha mikro. Program BPUM yang dimulai pada tahun 2020 sebagai salah satu bentuk pertahanan ekonomi masyarakat di masa pandemi Covid-19 telah dikembangkan dengan sangat baik sesuai kebutuhan pelaku usaha. Program ini juga tetap dilakukan pada tahun 2021. Artinya bahwa perkembangan program bantuan modal kepada pelaku usaha telah berhasil dan memberikan dampak pada para pelaku usaha dalam mempertahankan usaha mereka. Aspek konteks menunjukkan bahwa segala persiapan dalam meluncurkan program ini dilakukan dengan matang sehingga berdampak pada keberhasilan pengguna program BPUM. Aspek Input dirancang sesuai payung hukum resmi yang disesuaikan dengan peraturan yang telah dibuat pemerintah sehingga berdampak pada tata cara penyaluran bantuan yang benar. Aspek proses dilakukan mulai dari kegiatan sosialisasi sampai distribusi bantuan BPUM kepada para pelaku usaha secara prosedural sehingga berdampak pada keberhasilan menasar pelaku usaha yang membutuhkan bantuan modal. Pada aspek produk diketahui bahwa BPUM memberikan dampak yang cukup baik terhadap kondisi pemulihan bisnis pelaku usaha mikro.

Kata Kunci: Covid-19, Evaluasi, Program, Usaha Mikro

Abstract - The purpose of this study was to determine the development and impact of the government assistance program for micro-enterprises during the Covid-19 pandemic. This program was a form of government effort in dealing with the impact of the pandemic on the economic cycle of the community. The research approach was qualitative research through the CIPP (*Context, Input, Process, Product*) model evaluation method. Data were collected through observations and GAMEs program policy documents. Data analysis techniques consisted of data reduction, data presentation and concluding. The results showed that every aspect of CIPP has been implemented according to procedures and the government is also cooperating with relevant stakeholders. The GAMEs program has had a major impact on business defence for micro-enterprises. The program which started in 2020 as a form of community economic defence during the Covid-19 pandemic has been developed very well according to the needs of business actors. This program will also continue to be carried out in 2021. It means that the development of the capital assistance program for business actors has been successful and has an impact on business actors in maintaining their businesses. The context aspect shows that all preparations in launching this program were carried out carefully so that it had an impact on the success of GAMEs program users. The Input aspect is designed according to the official legal umbrella which is adjusted to the regulations that have been made by the government so that it has an impact on the correct procedure for distributing aid. The process aspect is carried out starting from socialization activities to the distribution of GAMEs assistance to business actors procedurally so that it has an impact on the success of targeting business actors who need capital assistance. In the product aspect, it is known that GAMEs has a fairly good impact on the condition of business recovery for micro-enterprises.

Keywords: Covid-19, Evaluation, Program, Micro-Enterprises

PENDAHULUAN

Masa pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan kehidupan manusia pada semua bidang, khususnya

pada bidang ekonomi cukup drastis (Nundy et al., 2021), termasuk industri ekonomi kreatif (Sigala, 2020; Soehardi et al., 2020; Khlystova et al., 2022). Kinerja ekonomi yang melemah ini tidak hanya terjadi pada sektor formal, namun juga sektor

informal, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Badan Pusat Statistik, 2020). Hasil survei Bank Pembangunan Asia (ADB) menunjukkan kondisi UMKM di Indonesia tergolong buruk, karena setengah dari UMKM terpaksa menutup usahanya dan setengah sisanya harus beroperasi dengan omzet yang menurun drastis pada Maret dan April (Shinozaki & Vandenberg, 2020). Keuangan UMKM di Indonesia mengalami penurunan yang serius pada modal kerjanya. Sebanyak 88 % usaha mikro dilaporkan tidak memiliki tabungan dan kehabisan uang pada masa pandemi. Akses terhadap pembiayaan formal terbatas, yang tercermin dari data 39 persen UMKM menggantungkan keuangannya pada pinjaman dari saudara.

Pemerintah melakukan berbagai upaya menghadapi dampak pandemi Covid-19 terhadap kelompok usaha yang paling rentan melalui pemberian bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Program bantuan ini dikenal dengan sebutan Banpres Produktif Usaha Mikro yang telah diluncurkan Presiden RI pada tanggal 14 Juli 2020. Pemberian bantuan modal kerja bagi pelaku usaha mikro ini diharapkan bisa memberikan perbaikan terhadap roda perekonomian nasional. BPUM merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden mengenai skema bantuan bagi pelaku UMKM kategori miskin dan rentan yang terdampak pandemi Covid-19. Bantuan tersebut termasuk salah satu program prioritas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan salah satu respon pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Berikut ini alokasi anggaran sebagai model UMKM (TNP2K, 2021);

Tabel 1. Alokasi Anggaran Dukungan UMKM dalam Program PEN

| Bentuk | Strategi | Rp (Triliun) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Relaksasi dan Tambahan Kredit | | 89,80 |
| Restrukturisasi Kredit Subsidi Bunga Kredit Kerja | Penempatan dana pemerintah | 67,60 |
| | | 19,00 |
| | Belanja imbal jasa penjaminan (IJP) | 2,20 |
| | Cadangan penjaminan modal kerja | 1,00 |
| Dukungan UMKM Lainnya | | 38,41 |
| | Pajak (PPh) final ditanggung pemerintah (DTP) | 1,10 |
| | Pembiayaan investasi koperasi melalui Lembaga pengelolaan dana bergulir (LPDB) | 1,29 |
| | Bantuan produk | 28,8 |
| Jumlah | | 120,81 |

Penetapan anggaran bantuan yang cukup besar

pada tabel 1 menggambarkan bahwa pemerintah memberikan perhatian yang besar dalam pemulihan sektor ekonomi. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian evaluasi program BPUM, agar dapat mengetahui perkembangan dan dampak dari program tersebut terhadap kondisi ekonomi khususnya para pelaku usaha mikro menggunakan konsep CIPP (*Context, Input, Process, dan product*)

Penelitian yang telah dilakukan terkait dengan evaluasi berbagai program menggunakan CIPP. Proses evaluasi CIPP diarahkan pada program pemberian bantuan modal kerja bagi pelaku usaha mikro. CIPP dianggap menjadi cara yang tepat untuk mengetahui keberhasilan program BPUM. Zhang et al. (2011) telah menjelaskan bahwa model evaluasi CIPP memberikan kerangka panduan sistematis untuk konsepsi, implementasi dan penilaian proyek pembelajaran berbasis layanan untuk pendidikan guru. Model evaluasi CIPP *Stufflebeam* telah digunakan dan dirancang tidak hanya untuk membuktikan suatu keputusan tetapi bertindak sebagai *fixer* dimana informasi tersebut dapat digunakan sebagai panduan untuk merancang suatu program (Hasan et al., 2015). Ada banyak model evaluasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu program. *Stufflebeam* dan *Shinkfield* menyarankan evaluasi produk dilakukan untuk empat aspek evaluasi: dampak, efektivitas, keberlanjutan, dan transportasi (Warju, 2016). Desain program memiliki banyak kendala. Kendala terbesar terdapat pada variabel proses dan produk terkait evaluasi prestasi belajar nonakademik (Darma, 2019).

METODE PENELITIAN

Prosedur penelitian kualitatif mengungkapkan tiga tahapan dalam penelitian kualitatif, yaitu 1) pra kerja lapangan, 2) kegiatan lapangan dan 3) analisis intensif (Moleong, 2007). Proses pengumpulan data adalah observasi yang dilakukan peneliti dengan mengunjungi beberapa lokasi pelaku usaha dan dokumen yang digunakan untuk menganalisis dan mengumpulkan data yang diambil dari buku pedoman program BPUM (Harimba et al., 2021).

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian evaluasi dengan metode model CIPP (*context, input, process, dan product*) (Stufflebeam, 2003). Kajian ini terkait dengan konsep dan struktur pekerjaan evaluasi yang memberikan pedoman untuk sampai pada deskripsi, penilaian, dan rekomendasi (Ruhe & Zumbo, 2009). Berikut ini rancangan penelitian;

Tabel 2. Rancangan penelitian evaluasi program BPUM

| Aspek CIPP | Komponen Evaluasi |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <i>Context</i> | Perencanaan dalam pengembangan program bantuan pemerintah untuk usaha mikro |
| <i>Input</i> | Landasan kebijakan bantuan pemerintah usaha mikro |

| | |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| <i>Process</i> | Sosialisasi program bantuan pemerintah usaha mikro |
| <i>Product</i> | Hasil dan penilaian program bantuan pemerintah usaha mikro |

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, pembahasan dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi, mengurutkan, menyederhanakan, mengabstraksikan dan mentransformasikan data dalam catatan lapangan, proses ini dilakukan selama penelitian. Penyajian data adalah reduksi data pada tingkat yang lebih tajam yang disajikan secara teratur. Informasi singkat lebih

terstruktur untuk memudahkan dalam menyimpulkan. Data yang telah dianalisis kemudian peneliti menyimpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari dokumen kebijakan bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro ditemukan beberapa bagian penting dalam perkembangan dari proses penyaluran bantuan yang telah disesuaikan dengan standar operasional dan aturan yang telah ditetapkan. Berikut hasil analisis perkembangan program BPUM melalui CIPP.

Tabel 3. Perkembangan Pelaksanaan Tahapan Program BPUM melalui CIPP

| Aspek CIPP | Penerapan | Temuan Perkembangan Pelaksanaan BPUM dan Rekomendasi |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Context</i> | Persiapan data dan registrasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membenahi basis data dan mengembangkannya, terutama data NIK, bidang usaha, skala usaha, dan nomor telepon/HP. 2. Registrasi dapat memanfaatkan aplikasi agar satu pintu dan format datanya sama |
| <i>Input</i> | Peraturan dalam penerapan program BPUM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PMK Nomor 173 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga 2. Tata cara penyaluran program BPUM dalam Permenkop UKM Nomor 6 Tahun 2020 3. Petunjuk Pelaksanaan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Nomor 98 Tahun 2020. |
| <i>Process</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi 2. Koordinasi lapangan 3. Pemberitahuan penyaluran 4. Aktivitas atau distribusi rekening | <ol style="list-style-type: none"> a. Strategi sosialisasi perlu diperkuat untuk bidang ekonomi b. Materi dan teknik sosialisasi perlu diseragamkan dari pusat c. Saluran diseminasi dapat meliputi media konvensional, media sosial, dan pertemuan virtual (rapat koordinasi, webinar, dan forum K/L). d. Memperkuat pedoman umum dengan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan (juknis/juklak) untuk memperjelas tugas, fungsi, dan tanggung jawab antar instansi. e. Membentuk tim pengendali BPUM pusat dan daerah untuk mengefektifkan koordinasi antar-K/L dan antar-OPD di daerah f. Menjajaki kerja sama dengan Kemendagri untuk melibatkan aparat pemerintah daerah hingga tingkat RT/RW dalam proses pemberitahuan penyaluran. g. Pembuatan <i>dashboard</i> (portal <i>monitoring</i>) yang didukung bank penyalur h. Melakukan pemetaan kendala lapangan (geografis). i. Meningkatkan sumber daya manusia perbankan dan akses kelokasi aktivasi j. Menyeragamkan SOP antar-bank penyalur dan antar wilayah |
| <i>Product</i> | Pemantauan program | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan sistem yang dapat menyajikan laporan yang tepat, cepat, dan akurat atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Kelengkapan data yang disampaikan pengusul; b. Validasi kriteria yang ditetapkan; c. Rekonsiliasi data dengan pengusul sebelum SK penetapan; d. Rekonsiliasi data dan nomor rekening dengan bank penyalur sebelum SK ditetapkan; dan |

- e. Rekonsiliasi data dengan pengusul dan penyalur sebelum perintah pemindahan dana dari rekening penampungan.
2. Untuk pemantauan proses dan perkembangan program, perlu dirancang sistem pemantauan yang seragam dari pusat hingga daerah terkait dengan
 - a. Kesesuaian penerima dengan kriteria;
 - b. Pemanfaatan bantuan;
 1. Identifikasi kendala di lapangan; dan
 2. Identifikasi potensi perbaikan pelaksanaan program ke depan

Pada table 3 menunjukkan hasil analisis perkembangan dan dampak dari program BPUM menggunakan metode CIPP. Pada aspek konteks disimpulkan bahwa program BPUM ini dilaksanakan secara bertahap dengan persiapan yang matang. Persiapan ini dilakukan sesuai hasil analisis kebutuhan pemberian bantuan untuk para pelaku usaha. Persiapan ini disesuaikan dengan kondisi masalah yang dimiliki pelaku usaha selama masa pandemi covid-19. Jadi, program BPUM ini telah dibuat sesuai tingkat masalah yang dihadapi dan diatur sesuai pada peraturan yang telah disiapkan pemerintah. Dengan demikian, memberikan dampak yang positif pada pelaku usaha dan proses registrasi dilakukan oleh pelaku usaha dengan benar.

Pada aspek input diketahui bahwa perkembangan dari setiap perencanaan program bantuan pemerintah seperti BPUM ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan. Pelaksana dari program ini juga mengikuti alur tata cara penyaluran program BPUM. Artinya bahwa perkembangan dari setiap tahapan penyaluran bantuan sesuai dengan prosedur. Hal ini berdampak pada keberhasilan penyaluran program BPUM dalam mempertahankan usaha dari para pelaku usaha.

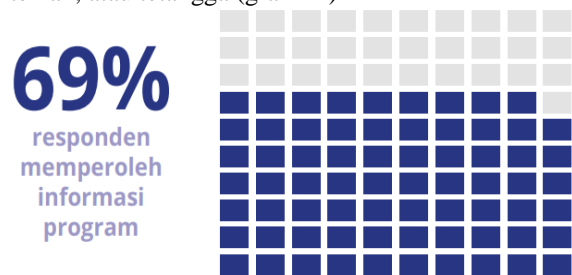
Pada aspek proses, kegiatan penyaluran program BPUM mulai dari proses sosialisasi, koordinasi lapangan, pemberitahuan proses penyaluran, dan aktivisasi rekening dilaksanakan dengan bertahap dan sesuai pada peraturan yang telah ditetapkan. Proses penyaluran program BPUM ini berkembang dengan sangat baik mengikuti kebutuhan dari pelaku usaha di masa pandemi Covid-19. Dampak dari proses ini adalah keberhasilan penyaluran program BPUM sebesar 75.6%.

Pada aspek produk diketahui bahwa para pelaku usaha yang menerima bantuan ini adalah para pelaku bisnis yang membutuhkan bantuan keuangan sebagai modal, sehingga bantuan ini dapat mempertahankan usaha mereka. Sistem yang telah dikembangkan oleh pemerintah dalam menyalurkan bantuan usaha dilakukan sesuai prosedur dari peraturan yang telah dibuat pemerintah. Hal ini berdampak pada pemanfaatan program BPUM dan para pelaku usaha tetap bisa menjalankan usaha mereka dengan baik.

Pemerintah Indonesia juga telah melakukan pendataan untuk mengetahui efektivitas bantuan program BPUM, Kemenkop, UKM Bersama TNP2K yang bersinergi melakukan pemantauan Bersama,

seperti di 12 provinsi terpilih, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Dari hasil pemantauan, mayoritas penerima bantuan (sekitar 69 persen) (pada grafik 1), mengetahui program. Angka ini dinilai cukup bagus jika dibandingkan dengan program pemerintah lainnya pada awal program berjalan. Artinya bahwa proses sosialisasi program BPUM sebelum pelaksanaan dilakukan dengan sangat tepat. Proses komunikasi pada semua lapisan masyarakat menjadi bagian yang cukup penting. Pada masa pandemi Covid-19, sosialisasi lebih diprioritaskan secara daring. Dengan adanya larangan berkerumun dan pembatasan sosial, informasi paling efektif disiarkan melalui media massa dan memanfaatkan media sosial hingga grup percakapan WhatsApp, maupun media lokal baik cetak, radio, dan TV lokal. Jadi cara sosialisasi yang dilakukan pemerintah sangat tepat di era kemajuan teknologi.

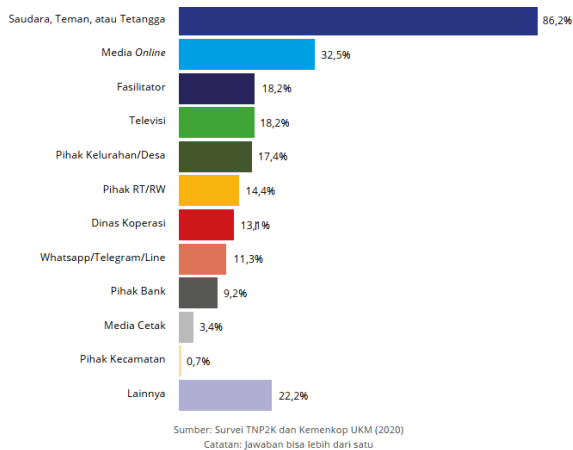
Thwal sumber informasi bagi pelaku usaha mikro mengetahui program BPUM, syarat kepesertaan, dan cara pendaftaran, sebagian besar responden (86,2 persen) menjawabnya dari saudara, teman, atau tetangga (grafik 2)



Sumber: Survei TNP2K dan Kemenkop UKM (2020)

Sumber: Data Hasil Survey Penelitian (2021)

Grafik 1. Akses Informasi Program (N=1.262)



Sumber: Data Hasil Survey Penelitian (2021)

Grafik 2. Sumber Informasi

Data temuan menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai prosedur dalam proses pemulihan ekonomi khusus para pelaku usaha mikro. Program BPUM telah mencapai keberhasilan yang cukup baik dan mencapai sasaran pengguna yang tepat. Walaupun program ini pertama kali dilakukan oleh pemerintah, namun pihak stakeholder terkait telah melakukan berbagai upaya yang bisa mencapai keberhasilan program.

Program ini juga menysasar usaha ultramikro dan mikro dengan kriteria tidak memanfaatkan akses kredit ke bank untuk permodalan, tidak berbadan hukum, belum menjadi wajib pajak, dan usahanya tidak bergerak di bidang industri, karena dampak pandemi covid-19 tidak hanya menysasar pelaku usaha mikro, akan tetapi semua lini tingkat usaha di seluruh dunia (Shinozaki & Vandenberg, 2020). Jarak sosial, isolasi diri, dan pembatasan perjalanan telah menyebabkan berkurangnya tenaga kerja di semua sektor ekonomi dan menyebabkan banyak pekerjaan hilang. Jadi, efek sosial-ekonomi COVID-19 pada aspek individu ekonomi terjadi di Indonesia dan seluruh dunia (Nicola et al., 2020)

KESIMPULAN

Program BPUM telah dilakukan semenjak tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19. Dari hasil analisis data bahwa penyaluran dana dari program BPUM tahun 2020 telah tersalurkan 100% kepada 12 juta pelaku usaha mikro. Program BPUM juga tetap dilakukan pada tahun 2021 dengan target 100% dalam mencapai pemanfaat program. Artinya bahwa perkembangan program BPUM ini sudah sangat baik dan dilakukan secara prosedural untuk para pelaku usaha yang membutuhkan bantuan modal usaha. Hasil analisis data disimpulkan bahwa program BPUM memberikan dampak yang cukup baik yaitu 1) BPUM memberikan manfaat besar kepada para pelaku usaha untuk bertahan menjalankan usahanya pada masa pandemi, 2) Tingkat keberhasilan aktivitas rekening baru bagi pelaku usaha dalam menggunakan program BPUM adalah 75.6%, dan program BPUM telah membantu para pelaku usaha tetap mengembangkan

usaha mereka di masa pandemi. Secara keseluruhan implementasi program bantuan modal kerja bagi pelaku usaha ini sangat bermanfaat untuk bertahan pada masa pandemi. Mayoritas penerima memanfaatkan dana bantuan untuk membeli bahan baku dan alat produksi. Beberapa pelaku usaha menggunakan dana bantuan untuk keperluan lainnya, seperti membayar utang, konsumsi, tabungan, biaya sekolah, dan biaya kesehatan. BPUM tersalurkan secara tepat sasaran sesuai dengan persyaratan dan kriteria, serta secara umum pelaku usaha penerima BPUM tergolong kelompok usaha mikro.

Selama ini pelaksanaan penerapan kebijakan pemberian bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro diterapkan secara prosedural. Setiap program bantuan pemerintah kepada pelaku ekonomi selalu dikembangkan sesuai hasil dari tingkat keberhasilan yang terjadi di lapangan.

Adapun beberapa rekomendasi dari kebijakan bantuan bagi pelaku usaha mikro ini adalah;

1. Bantuan disesuaikan kembali dengan program yang dibutuhkan masyarakat dengan pendampingan yang terkontrol sehingga dana tersalurkan dengan tepat.
2. Merancang pedoman penerapan program bantuan modal kerja sehingga pelaku usaha mikro menggunakan dana sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan khusus untuk meningkatkan dan perbaikan usaha
3. Memperjelas sinergi ataupun perpaduan BPUM dengan program pemberdayaan UMKM agar dana yang disalurkan tepat sasaran dan tidak ada pelaku usaha yang menerima bantuan secara ganda.
4. Adanya kerjasama untuk semua Kementerian terkait agar setiap program yang dikeluarkan pemerintah tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.

Hasil penelitian ini sebatas pada evaluasi dari dokumen kebijakan program BPUM dan observasi lapangan terbatas, sehingga data yang digunakan masih terbatas. Dengan demikian, penelitian ini masih bisa dikembangkan pada pengembangan dampak peningkatan ekonomi ataupun keuntungan dari usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha mikro, peneliti selanjutnya bisa melakukan penyebaran kuesioner agar data yang diperoleh lebih luas dan jangkauan wilayah yang besar.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020*. https://www.bps.go.id/website/materi_ind/%0AmateriBrsInd-20200805114633.pdf.
- Darma, I. K. (2019). The effectiveness of teaching program of CIPP evaluation model. *International Research Journal of Engineering, IT & Scientific Research*, 5(3), 1–13.

- <https://doi.org/10.21744/irjeis.v5n3.619>
- Harimba, H., Rachman, Widiyanto, B., & Hadi, S. (2021). *Tim Pemantauan Bersama Program Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)*. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
- Hasan, A., Yasin, S. N. T. M., & Yunus, M. F. M. (2015). A Conceptual Framework for Mechatronics Curriculum Using Stufflebeam CIPP Evaluation Model. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 195, 844–849. <https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2015.06.324>
- Khlystova, O., Kalyuzhnova, Y., & Belitski, M. (2022). The impact of the COVID-19 pandemic on the creative industries: A literature review and future research agenda. *Journal of Business Research*, 139, 1192–1210. <https://doi.org/10.1016/J.JBUSRES.2021.09.062>
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya.
- Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., Agha, M., & Agha, R. (2020). The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19): A review. *International Journal of Surgery*, 78, 185–193. <https://doi.org/10.1016/J.IJSU.2020.04.018>
- Nundy, S., Ghosh, A., Mesloub, A., Albaqawy, G. A., & Alnaim, M. M. (2021). Impact of COVID-19 pandemic on socio-economic, energy-environment and transport sector globally and sustainable development goal (SDG). *Journal of Cleaner Production*, 312, 127705. <https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2021.127705>
- Ruhe, V., & Zumbo, B. D. (2009). *Evaluation in Distance Education and E-learning: The Unfolding Model*. Guilford Press. <https://doi.org/10.1080/00220620.2010.516907>
- Shinozaki, S., & Vandenberg, P. (2020). Impact of COVID-19 on Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises in Developing Asia: Evidence from the Rapid Surveys. *ADB*.
- Sigala, M. (2020). Tourism and COVID-19: Impacts and implications for advancing and resetting industry and research. *Journal of Business Research*, 117, 312–321. <https://doi.org/10.1016/J.JBUSRES.2020.06.015>
- Soehardi, S., Permatasari, D. A., & Sihite, J. (2020). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Tempat Wisata dan Kinerja Karyawan Pariwisata di Jakarta. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.31599/JKI.V1I1.216>
- Stufflebeam, D. L. (2003). The CIPP Model for Evaluation. In *International Handbook of Educational Evaluation* (pp. 31–62). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-010-0309-4_4
- Suryobroto, A. S., Hastuti, T. A., & Jatmika, H. M. (2018). Using the Context, Input, Process, and Product Evaluation Model (CIPP) to Evaluate Elementary School Teacher-Learner Program of Physical Education in Yogyakarta City. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 278.
- TNP2K. (2021). *Mempertahankan Usaha Mikro pada Masa Pandemi Covid-19*. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.
- Umam, K. A., & Saripah, I. (2018). Using the Context, Input, Process and Product (CIPP) Model in the Evaluation of Training Programs. *International Journal of Pedagogy and Teacher Education (IJPTE)*, 2(July).
- Warju, W. (2016). Educational Program Evaluation using CIPP Model. *Innovation of Vocational Technology Education*, 12(1). <https://doi.org/10.17509/invotec.v12i1.4502>
- Zhang, G., Zeller, N., Griffith, R., Metcalf, D., Williams, J., Shea, C., & Misulis, K. (2011). Using the Context, Input, Process, and Product Evaluation Model (CIPP) as a Comprehensive Framework to Guide the Planning, Implementation, and Assessment of Service-learning Programs. *Journal of Higher Education Outreach and Engagement*, 15(4), 57–84.